

ABSTRAK

Sebagai upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan potensi cadangan minyak dan gas bumi Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan *gross split* dalam kontrak bagi hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui urgensi penetapan kebijakan *gross split*. Kedua, menggambarkan pengaturan *gross split* dalam meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penetapan kebijakan *gross split* didasari oleh beberapa faktor seperti penurunan penerimaan negara dan peningkatan jumlah cost recovery yang melebihi penerimaan negara pada tahun 2015 dan 2016, penurunan cadangan minyak dan gas bumi, penurunan harga minyak mentah Indonesia dan penurunan produksi minyak dan gas bumi yang hampir terjadi setiap tahunnya. Pasca berlakunya kebijakan *gross split* nilai investasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi mengalami peningkatan tetapi tidak berbanding lurus dengan produksi minyak dan gas bumi. Hal ini terjadi karena wilayah kerja baru masih belum dapat melakukan eksplorasi secara maksimal sehingga perusahaan penyumbang produksi minyak dan gas bumi Indonesia masih berasal dari perusahaan dengan lapangan – lapangan penghasil minyak dan gas bumi yang sudah tua.

Kata Kunci: Kebijakan, Minyak dan Gas Bumi, *Gross Split*.